



Evolusi Manajemen Keuangan *Digital* dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Kajian Sistematis melalui Analisis *Bibliometrik* dan Sintesis Tematik

Muhammad Haris Saputra^{1*}, Kurnia Permana²

mharissaputra@unja.ac.id^{1*}, kurniapermana@unja.ac.id²

^{1,2}Program Studi Manajemen Pemerintahan

^{1,2}Universitas Jambi

Received: 16 11 2025. Revised: 21 11 2025. Accepted: 17 12 2025.

Abstrak : This study aims to analyze the development and challenges of digital finance in supporting financial inclusion in Indonesia through a systematic review of relevant literature. This study used the Systematic Literature Review method with PRISMA guidelines, combined with bibliometric analysis to map publication trends and thematic analysis to identify conceptual patterns within the five main pillars of digital finance. The analysis process was conducted iteratively with validation between researchers to ensure consistency of results. The results indicate that digital finance plays a significant role in expanding access to financial services, increasing transaction efficiency, and national economic growth. However, challenges remain, including infrastructure inequality, data security, and financial literacy gaps in rural areas. This study contributes to the development of financial management science by emphasizing the importance of collaboration between regulators, industry, and the community in creating an inclusive, ethical, and sustainable digital financial ecosystem.

Keywords : Digital finance; Financial inclusion; Bibliometric analysis; Thematic synthesis.

Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan tantangan keuangan digital dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia melalui pendekatan kajian sistematis terhadap literatur yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* dengan pedoman PRISMA, yang dikombinasikan dengan analisis bibliometrik untuk memetakan tren publikasi, dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola konseptual dalam lima pilar utama keuangan digital. Proses analisis dilakukan secara berulang dengan validasi antarpeneliti untuk memastikan konsistensi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan digital berperan penting dalam perluasan akses layanan keuangan, peningkatan efisiensi transaksi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tantangan masih ditemukan pada aspek ketimpangan infrastruktur, keamanan data, serta kesenjangan literasi keuangan di wilayah pedesaan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen keuangan dengan menegaskan pentingnya kolaborasi antara regulator, industri, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Keuangan digital; Inklusi keuangan; Analisis bibliometrik; Sintesis tematik.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah menjadi katalis utama perubahan ekonomi global. Kemunculan layanan *financial technology* (FinTech), *digital banking*, *mobile payment*, dan *e-wallet* telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan informal, sekaligus mengubah paradigma intermediasi keuangan tradisional (Ozili, 2018; Gomber et al., 2018). Digitalisasi ini diyakini mampu meningkatkan *financial inclusion* dengan mempercepat akses bagi kelompok yang sebelumnya tidak terlayani (*unbanked population*) di negara berkembang, termasuk Indonesia (Yaqin & Safuan, 2023). Namun demikian, peningkatan inklusi keuangan melalui digitalisasi tidak serta merta menghapus kesenjangan yang telah ada. Studi-studi menunjukkan bahwa keuangan digital justru dapat menciptakan bentuk baru dari eksklusi keuangan akibat keterbatasan literasi digital, infrastruktur, dan regulasi (Moorena, 2019; Salsati, 2025). Indonesia menghadapi tantangan besar berupa *digital divide* antara daerah perkotaan dan pedesaan serta perbedaan adopsi antar kelompok usia, pendidikan, dan gender (Chotrianda, Setiawan, & Mawardi, 2024). Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk meninjau ulang asumsi bahwa digitalisasi selalu identik dengan inklusi.

Dari sisi teori, penelitian ini berpijak pada konsep Inclusive Financial System Framework (Sarma & Pais, 2011) dan teori *Digital Financial Inclusion* (Ozili, 2018). Dalam kerangka ini, inklusi keuangan dipahami sebagai akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan yang dapat mendorong kesejahteraan ekonomi. Namun, teori tersebut belum sepenuhnya diuji dalam konteks negara berkembang yang memiliki disparitas infrastruktur digital seperti Indonesia. Penelitian terdahulu di negara maju banyak menyoroti efisiensi dan inovasi FinTech (Gomber et al., 2018), sedangkan di Indonesia isu regulasi, keamanan data, dan perilaku pengguna masih menjadi faktor kunci (Murtama & Falianty, 2024; Syahnur, Surianto, & Dharsana, 2023). Urgensi penelitian ini berangkat dari dua realitas: pertama, keuangan digital telah menjadi fokus utama kebijakan nasional melalui *National Strategy for Financial Inclusion (SNKI)*; kedua, penelitian-penelitian yang ada masih bersifat terfragmentasi dan sektoral. Misalnya, studi Widarwati, Solihin, dan Nirmalasari (2022) hanya meninjau kontribusi perbankan digital terhadap inklusi keuangan; sedangkan Fadhilah (2024) menyoroti aspek digital payment tanpa melihat konteks kebijakan makro. Tidak ada sintesis sistematis yang menghubungkan dimensi sosial, regulatif, dan ekonomi dalam satu kerangka yang komprehensif.

Secara rasional, *systematic literature review* (SLR) diperlukan untuk mengidentifikasi “black box” dari keuangan digital di Indonesia, yaitu bagaimana mekanisme internal, regulasi, perilaku, dan teknologi berinteraksi dalam membentuk tingkat inklusi keuangan. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memetakan hasil penelitian yang tersebar, mengidentifikasi pola, dan menemukan kesenjangan ilmiah yang belum terungkap (Tranfield et al., 2003). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memverifikasi temuan terdahulu, tetapi juga mengembangkan arah penelitian baru yang lebih kontekstual dengan kondisi Indonesia. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa literatur internasional telah banyak membahas digital finance di negara berkembang, seperti Tiongkok (Zhou, 2021), India (Sarma & Pais, 2011), dan Kenya (Jack & Suri, 2014), namun konteks Indonesia masih jarang dikaji secara sistematis. Kajian lokal yang ada (e.g., Murtama & Falianty, 2024; Serang et al., 2024) lebih bersifat empiris sektoral dan belum mengungkap keterhubungan antara dimensi akses, regulasi, teknologi, sosial, dan ekonomi. Inilah *state of the art* penelitian ini—menghadirkan sintesis literatur lintas bidang untuk memahami kompleksitas keuangan digital Indonesia secara holistik.

Dari sisi keterbaruan metode (*novelty*), penelitian ini mengadaptasi pendekatan PRISMA-based Systematic Review (Page et al., 2021) dengan kombinasi bibliometric mapping menggunakan *VOSviewer* untuk menelusuri pola kolaborasi penulis dan co-occurrence keywords. Pendekatan ini belum banyak digunakan dalam konteks literatur keuangan digital Indonesia. Selain itu, kerangka analisis lima pilar (aksesibilitas, regulasi, teknologi, sosial, ekonomi) diadaptasi dan dikontekstualisasikan untuk menjelaskan tantangan keuangan digital yang spesifik terhadap kondisi Indonesia. Penelitian ini diharapkan menghasilkan dua kontribusi utama. Pertama, dari sisi teoretis, memperluas pemahaman tentang *digital financial inclusion* dengan mempertimbangkan faktor sosial-budaya dan kebijakan di negara berkembang. Kedua, dari sisi praktis, memberikan rekomendasi bagi regulator dan industri keuangan dalam merancang kebijakan digital finance yang lebih inklusif, aman, dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang dikembangkan berdasarkan panduan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA 2020) (Page et al., 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, menilai, dan mensintesis literatur secara sistematis, transparan,

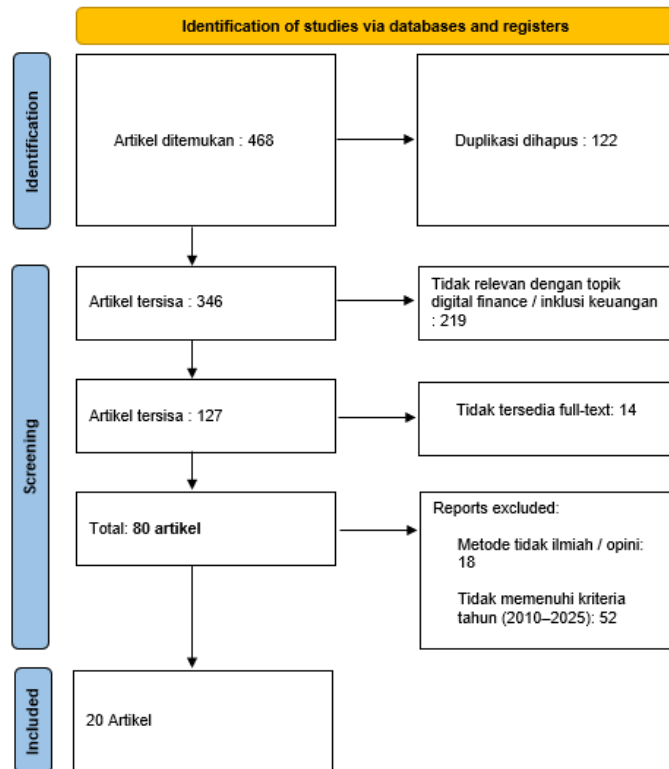
serta replikatif. SLR dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif terhadap penelitian keuangan digital dan inklusi keuangan di Indonesia, sekaligus menemukan kesenjangan (gap) penelitian dan peluang teoretis baru (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003). Metode ini juga mengadopsi prinsip *evidence-based management research* (Denyer & Tranfield, 2009) yang menekankan penggunaan bukti ilmiah sebagai dasar formulasi kebijakan dan pengembangan teori di bidang manajemen keuangan digital. Ruang lingkup penelitian ini mencakup literatur yang meneliti hubungan antara keuangan digital (digital finance) dan inklusi keuangan (financial inclusion) dalam konteks Indonesia. Objek kajian berupa artikel ilmiah primer (jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2 dan jurnal internasional Scopus/WoS) yang diterbitkan antara 2010 hingga 2025. Pendekatan multidimensi ini memungkinkan pemetaan hubungan antara faktor teknologi, perilaku sosial, kebijakan publik, dan struktur ekonomi terhadap pencapaian inklusi keuangan digital di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh artikel ilmiah yang memuat tema “digital finance” dan “financial inclusion” dalam konteks Indonesia. Sampel ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Analisis dilakukan secara campuran (mixed analysis) yang menggabungkan: Analisis Bibliometrik untuk mengidentifikasi tren publikasi, jaringan kolaborasi penulis, dan kluster topik penelitian menggunakan VOSviewer dan Bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017). Analisis Tematik Kualitatif menggunakan pendekatan *thematic synthesis* (Thomas & Harden, 2008) untuk mengelompokkan temuan berdasarkan lima pilar tantangan digital finance (Trotta et al., 2025). Sintesis Naratif Merangkum hubungan antar tema serta mengidentifikasi gap riset dan rekomendasi kebijakan (Popay et al., 2006). Proses analisis dilakukan secara berulang (*iterative*) untuk memastikan konsistensi dan keabsahan hasil. Validitas dijaga melalui *peer debriefing* dan *inter-coder agreement* antara dua peneliti dalam proses pengodean data (Miles & Huberman, 1994). Reliabilitas ditingkatkan dengan dokumentasi transparan seluruh tahapan PRISMA dan penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan audit trail data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil *Systematic Literature Review* (SLR) menunjukkan peningkatan signifikan penelitian terkait keuangan digital dan inklusi keuangan di Indonesia dalam satu dekade terakhir, terutama setelah tahun 2020. Percepatan ini dipicu oleh pandemi COVID-19 yang mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan transformasi model bisnis keuangan. Temuan

ini sejalan dengan tren global di mana inovasi digital menjadi faktor pendorong utama ekspansi layanan keuangan formal di negara berkembang (Ozili, 2018; Zhou, 2021).



Gambar 1. Prisma

Hasil analisis bibliometrik menggunakan perangkat *VOSviewer* dan *Bibliometrix* mengidentifikasi tiga klaster utama tema riset: (1) *digital payment and mobile banking*, (2) *financial literacy and behavior*, dan (3) *regulation and FinTech governance*. Struktur ini mengindikasikan bahwa literatur di Indonesia masih terfragmentasi berdasarkan isu sektoral, dengan dominasi penelitian perilaku pengguna dan adopsi teknologi, sementara dimensi kebijakan makro dan etika digital masih relatif jarang dikaji (Murtama & Falianty, 2024; Aria & Cuccurullo, 2017).

Tabel 1. Tahapan Seleksi Artikel berdasarkan PRISMA 2020

Tahap Seleksi	Jumlah Artikel	Keterangan
Identifikasi awal	468	Ditemukan dari Scopus, WoS, Google Scholar, dan Sinta
Duplikasi dihapus	122	Artikel ganda otomatis dihapus
Screening judul & abstrak	127 lolos dari 346	Non-relevan disaring
Evaluasi full-text	80 lolos dari 127	Tidak memenuhi kriteria eksklusi
Artikel akhir	20 Artikel	Masuk sintesis bibliometrik dan tematik

Tabel 2. Distribusi Artikel berdasarkan Kategori Penelitian

Kategori Penelitian	Jumlah	Persentase
Digital payment & mobile banking	6	30%

FinTech lending & UMKM	4	20%
Literasi keuangan digital	3	15%
Regulasi & tata kelola	3	15%
Inklusi keuangan & pembangunan ekonomi	4	20%
Total	20	100%

Analisis *authorship network* memperlihatkan dominasi peneliti dari universitas besar dan lembaga keuangan nasional, dengan kolaborasi internasional yang masih terbatas. Padahal, di tingkat global, penelitian *digital finance* cenderung multidisiplin dan kolaboratif lintas negara (Gomber, Koch, & Siering, 2018). Keterbatasan ini membuka peluang untuk memperkuat jejaring riset internasional agar hasil penelitian Indonesia lebih berkontribusi dalam diskursus global mengenai keuangan digital inklusif. Dimensi aksesibilitas menjadi tema yang paling banyak muncul dalam literatur Indonesia. Penelitian oleh Chotrianda, Setiawan, dan Mawardi (2024) menemukan bahwa pemerataan infrastruktur digital menjadi hambatan utama dalam perluasan inklusi keuangan, terutama di wilayah timur Indonesia.

Akses internet yang terbatas dan biaya data yang tinggi menghambat adopsi layanan *mobile banking* dan *e-wallet* oleh masyarakat berpendapatan rendah. Hasil ini selaras dengan laporan *Global Findex Database 2021* (Demirgüç-Kunt et al., 2022), yang mencatat bahwa 31% masyarakat dewasa Indonesia belum memiliki rekening formal, meskipun penetrasi ponsel pintar mencapai lebih dari 70%. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara ketersediaan teknologi dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkannya. Dibandingkan dengan pengalaman Tiongkok, Zhou (2021) menemukan bahwa keberhasilan *digital financial inclusion* di pedesaan ditopang oleh investasi besar pada infrastruktur jaringan dan sistem pembayaran nasional yang terintegrasi. Indonesia masih tertinggal dalam hal ini, sehingga perlu strategi kebijakan publik yang lebih agresif dalam mengembangkan *digital ecosystem* yang inklusif hingga ke pelosok daerah.

Aspek regulasi dan kebijakan muncul sebagai pilar kritis dalam mendorong keberlanjutan keuangan digital. Studi Murtama dan Falianty (2024) menegaskan bahwa regulasi FinTech di Indonesia masih bersifat adaptif dan fragmentaris. Perkembangan teknologi yang cepat tidak selalu diimbangi dengan kesiapan regulasi, sehingga menimbulkan risiko perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan. Fadhilah (2024) menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam pengawasan sistem pembayaran digital. Ketidaksinkronan kebijakan menyebabkan munculnya tumpang tindih dalam pengaturan dan pengawasan produk keuangan digital baru. Sebagai pembandingan, Sarma dan Pais (2011) menunjukkan bahwa kesuksesan sistem *Unified Payments*

Interface (UPI) di India terjadi karena adanya koordinasi kebijakan antar-lembaga regulator sejak awal. Penelitian internasional oleh Ozili (2018) menegaskan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan regulasi. Terlalu ketatnya aturan dapat menghambat inovasi, sementara kelonggaran regulasi berisiko menurunkan kepercayaan publik. Indonesia perlu menerapkan pendekatan *proactive regulation* yang berorientasi pada mitigasi risiko digital sambil tetap mendukung inovasi inklusif.

Isu teknologi dan etika menjadi dimensi yang mulai mendapat perhatian dalam literatur keuangan digital Indonesia. Penelitian oleh Serang, Kalsum, Pasagi, dan Putri (2024) menunjukkan bahwa FinTech berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, namun banyak pelaku usaha belum memahami risiko keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Hakim, Prawwatya, Huda, dan Rizaldi (2024) menyoroti munculnya praktik *predatory lending* dalam layanan *peer-to-peer (P2P) lending* yang belum diatur secara ketat. Masalah ini menunjukkan perlunya standar etika yang kuat dalam tata kelola data dan perlindungan konsumen. Fenomena serupa ditemukan di Kenya, di mana kepercayaan pengguna menjadi elemen penting keberhasilan *mobile money* (Jack & Suri, 2014). Secara global, konsep *digital ethics* telah menjadi bagian integral dari kebijakan keuangan digital. Namun, di Indonesia, topik ini masih minim eksplorasi empiris. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya integrasi aspek etika digital sebagai bagian dari kerangka *digital financial inclusion* yang lebih luas (Trotta et al., 2025).

Dimensi sosial dan perilaku menjadi fokus paling dominan dalam literatur nasional. Sriyono, Irawan, dan Andjani (2023) menemukan bahwa persepsi risiko, literasi keuangan digital, dan kepercayaan terhadap lembaga FinTech menjadi faktor penentu adopsi layanan keuangan digital. Studi ini juga menegaskan bahwa kepercayaan merupakan variabel mediasi antara literasi keuangan dan niat menggunakan layanan digital. Penelitian Syahnur, Surianto, dan Dharsana (2023) menambahkan bahwa perempuan pelaku usaha mikro di Indonesia masih menghadapi hambatan kultural dan literasi digital rendah dalam mengakses layanan keuangan digital. Hal ini mengindikasikan bahwa inklusi keuangan digital belum sepenuhnya berkeadilan gender. Secara internasional, Gomber et al. (2018) serta Zhou (2021) menegaskan bahwa *trust* merupakan faktor universal keberhasilan keuangan digital. Namun, di Indonesia, faktor sosial-budaya seperti norma religius dan preferensi uang tunai memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku adopsi. Keunikan ini menunjukkan bahwa pendekatan perilaku keuangan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks nilai-nilai sosial dan keagamaan.

Pada dimensi ekonomi, digitalisasi keuangan terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Widarwati, Solihin, dan Nurmalasari (2022) menemukan bahwa adopsi layanan keuangan digital meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas basis nasabah perbankan. Namun, manfaat ini belum tersebar merata. Penelitian Murtama dan Falianty (2024) mengungkap bahwa kelompok berpendapatan menengah ke atas memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah. Temuan ini memperkuat argumentasi Zhou (2021) bahwa *digital finance* cenderung memperkuat ketimpangan sosial ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kebijakan redistributif. Dalam konteks UMKM, Serang et al. (2024) menunjukkan bahwa FinTech dapat memperkuat kapasitas bisnis mikro, namun keberlanjutannya sangat tergantung pada dukungan kebijakan fiskal dan regulasi yang ramah inovasi. Dengan demikian, diperlukan strategi yang mengintegrasikan pendekatan ekonomi digital dengan kebijakan pemberdayaan sosial.

Hasil SLR ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama dalam penelitian keuangan digital di Indonesia. Pertama, *gap konseptual*, di mana sebagian besar studi mendefinisikan inklusi keuangan sebatas akses, tanpa mempertimbangkan dimensi kualitas penggunaan atau dampak sosial-ekonomi jangka panjang (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Kedua, *gap metodologis*, karena banyak penelitian masih menggunakan survei deskriptif tanpa memanfaatkan pendekatan longitudinal atau bibliometrik yang lebih komprehensif. Ketiga, *gap tematik*, yaitu minimnya riset mengenai keamanan data, etika digital, dan kesetaraan gender. Kesenjangan ini memperlihatkan perlunya paradigma penelitian baru yang bersifat multidisiplin dan intersektoral, yang menggabungkan aspek teknologi, kebijakan, sosial, dan ekonomi secara simultan. Pendekatan ini akan memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap fenomena digitalisasi keuangan di Indonesia.

Keterbaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggabungan tiga pendekatan analisis: Systematic Literature Review berbasis PRISMA, bibliometric mapping, dan thematic synthesis menggunakan lima pilar Trotta et al. (2025). Pendekatan ini memberikan pemetaan sistematis terhadap dinamika riset digital finance di Indonesia dan menawarkan sintesis konseptual yang dapat digunakan sebagai kerangka teori baru. Secara teoretis, penelitian ini memperluas model *Digital Financial Inclusion* (Ozili, 2018) dengan memasukkan dimensi etika digital dan sosial-budaya sebagai determinan penting keberhasilan inklusi. Secara metodologis, penelitian ini merupakan salah satu dari sedikit studi di Indonesia yang menggabungkan analisis bibliometrik dengan sintesis tematik lintas disiplin.

Hasil penelitian nasional menunjukkan fokus kuat pada aspek perilaku dan adopsi pengguna, sedangkan penelitian internasional menekankan hubungan antara digital finance dan stabilitas keuangan makro (Ozili, 2018; Zhou, 2021). Meskipun berbeda fokus, keduanya sepakat bahwa literasi digital dan kepercayaan pengguna adalah kunci keberhasilan inklusi keuangan. Penelitian internasional seperti Jack dan Suri (2014) di Kenya dan Sarma dan Pais (2011) di India memperlihatkan pentingnya intervensi kebijakan publik dalam memperluas inklusi. Di Indonesia, intervensi tersebut sudah dimulai melalui Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNKI), namun efektivitasnya belum dievaluasi secara empiris melalui pendekatan sistematis. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dengan mempertemukan pendekatan nasional yang berorientasi perilaku dan internasional yang berorientasi kebijakan dalam satu kerangka analisis terintegrasi.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *digital financial inclusion* harus dipahami secara multidimensional, mencakup aspek teknologi, regulasi, sosial, dan etika. Temuan ini memperluas teori *Inclusive Financial System* (Sarma & Pais, 2011) dengan menambahkan konteks digitalisasi dan perilaku sosial sebagai elemen penting. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk memperkuat regulasi yang berorientasi pada perlindungan konsumen dan keamanan digital. Penelitian ini juga menawarkan implikasi bagi lembaga keuangan dan FinTech untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memperhatikan dimensi etika dalam inovasi produk digital.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi strategis terhadap pengembangan ilmu manajemen keuangan dan kebijakan publik. Pertama, penelitian ini memperkuat pentingnya kolaborasi antara akademisi, regulator, dan pelaku industri dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan. Kedua, hasil sintesis tematik menunjukkan perlunya pendekatan lintas disiplin yang menggabungkan teori manajemen, teknologi informasi, dan ekonomi pembangunan. Secara kebijakan, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat program literasi digital di daerah, memperluas infrastruktur keuangan berbasis digital, dan memastikan regulasi data pribadi yang tegas. Pendekatan ini akan memastikan digitalisasi keuangan berjalan inklusif, beretika, dan berkeadilan sosial.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan keuangan digital di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama setelah pandemi

COVID-19 yang mempercepat transformasi digital di sektor keuangan. Berdasarkan analisis bibliometrik dan sintesis tematik, teridentifikasi bahwa riset mengenai keuangan digital dan inklusi keuangan nasional masih terkonsentrasi pada isu perilaku pengguna dan adopsi teknologi, sementara dimensi etika, regulasi, dan dampak sosial-ekonomi masih relatif kurang dieksplorasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi telah membuka akses keuangan lebih luas, pemerataan manfaat dan perlindungan konsumen masih menjadi tantangan utama dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa inklusi keuangan digital di Indonesia tidak dapat hanya diukur dari peningkatan akses, tetapi juga dari kualitas, keberlanjutan, dan keadilan sosial yang dihasilkan. Keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek teknologi, sosial, ekonomi, dan etika keuangan digital. Oleh karena itu, pengembangan ilmu manajemen keuangan ke depan perlu berorientasi pada *responsible digital finance*, yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga etis, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Chotrianda, N. F., Setiawan, D., & Mawardi, W. (2024). Digital technology on financial inclusion and economic justice in Indonesia. *Research Horizon*, 4(6), 213–222. <https://doi.org/10.54518/researchhorizon.v4i6.264>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansa, R. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. Washington, DC: The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>
- Fadhilah. (2024). Digitalisasi sistem pembayaran dan dampaknya terhadap inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 400–419. <https://doi.org/10.54099/jieb.v2i2.447>
- Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2018). Digital finance and FinTech: Current research and future directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580. <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>

- Hakim, L., Prawwatya, N., Huda, C., & Rizaldi, M. (2024). FinTech lending and Sharia financial inclusion in Indonesia. *SHARE: Journal of Islamic Economics*, 13(1), 45–59. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.15637>
- Jack, W., & Suri, T. (2014). Risk sharing and transaction costs: Evidence from Kenya's mobile money revolution. *American Economic Review*, 104(1), 183–223. <https://doi.org/10.1257/aer.104.1.183>
- Murtama, A. J., & Falianty, T. A. (2024). The role of digitalization of financial inclusion in reducing income gaps. *International Journal of Applied and Advanced Multidisciplinary Research*, 2(3), 201–220. <https://doi.org/10.55577/ijaamr.2024.02315>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Rodgers, M., & Britten, N. (2006). *Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews: A product from the ESRC methods programme*. London: University of London.
- Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial inclusion and development. *Journal of International Development*, 23(5), 613–628. <https://doi.org/10.1002/jid.1698>
- Serang, A. E. D., Kalsum, U., Pasagi, Y., & Putri, E. H. (2024). The role of FinTech in MSME growth in Indonesia. *Oikonomia Journal of Management, Economics and Accounting*, 2(3), 115–128. <https://doi.org/10.37034/oikonomia.v2i3.463>
- Sriyono, S., Irawan, M. F., & Andjani, S. (2023). Evaluation of FinTech's impact on financial inclusion in Indonesia. *Management Journal of BINANIAGA*, 8(2), 93–101. <https://doi.org/10.33062/mjb.v8i2.532>
- Syahnur, K. N. F., Surianto, D. F., & Dharsana, M. T. (2023). Digital financial literacy and inclusion among Indonesian women entrepreneurs. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(1), 71–83. <https://doi.org/10.38043/jmb.v11i1.1897>
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8(1), 45–56. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>

- Trotta, A., De Luca, F., Pacelli, V., & Ventura, M. (2025). The black box of digital finance: Challenges and drawbacks of financial inclusion. *Technological Forecasting and Social Change*, 215, 123899. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2025.123899>
- Widarwati, E., Solihin, A., & Nurmalasari, N. (2022). Digital finance for improving financial inclusion in Indonesian banking. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 11(1), 17–30. <https://doi.org/10.15408/sjie.v11i1.23164>
- Yaqin, M., & Safuan, S. (2023). Digital financial inclusion and implications for developing countries' economic growth. *Journal of Developing Economies*, 8(1), 29–48. <https://doi.org/10.20473/jde.v8i1.39278>
- Zhou, X. (2021). Digital finance and household welfare: Evidence from China. *Economic Modelling*, 98, 400–416. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.03.009>